

Problem Pengembangan Perguruan Tinggi Islam

Salah satu problem pengembangan PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri) terletak pada penyediaan dan pengelolaan pendanaannya. UIN atau PTAIN sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah kewenangan pemerintah,-----berstatus negeri, telah memiliki pola pengelolaan dana secara baku. yang system itu harus diikuti apa adanya. Lebih-lebih, pada masa sekarang, semua hal serba dituntut mengikuti disiplin anggaran, transparansi maupun akuntabilitas yang tinggi. Kebijakan pemerintah itu baik, akan melahirkan disiplin pengelolaan, tetapi pada sisi lain akan berakibat lembaga pendidikan memilikin ruang gerak yang terbatas. Dalam suasana seperti itu rasanya pimpinan perguruan tinggi tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti aturan pengelolaan dana itu secara apa adanya. Walaupun sesungguhnya, dengan sikap seperti itu, saya kira semua tahu, menjadikan PTAIN tidak akan banyak mengalami kemajuan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Maksimal yang bisa diraih dengan keadaan seperti itu hanyalah sebatas keberhasilan “menjalankan” perguruan tinggi. Padahal seharusnya yang diharapkan dari pimpinan perguruan tinggi bukan sekedar melakukan peran itu, melainkan sebisa-bisa harus mendinamisasi, melakukan inovasi dan dan bahkan mereformulasi lembaganya secara terus menerus sesuai dengan dinamika masyarakat yang selalu berubah pada setiap saat.

Manakala Pimpinan PTAIN berani melakukan terobosan yang agak menyimpang dari DIPA yang telah ditetapkan, maka ia akan menghadapi resiko dari dua arah, yaitu pertama dari pihak-pihak pengawas keuangan ---Irjen, BPKP, BPK dan sejenisnya, dan kedua dari masyarakat dalam hal ini mahasiswa. Atas dasar paradigma penggunaan keuangan seperti sekarang ini, rasanya tugas pimpinan PTAIN bukan dituntut mengembangkan lembaganya melalui pencaharian strategi mana agar perguruan tingginya menjadi lebih maju, melainkan bagaimana agar lembaga yang dipimpin berjalan secara tertib, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal itu sesungguhnya syah-syah saja dan bagus, agar tidak terjadi penyimpangan yang berkonotasi negatif. Akan tetapi sesungguhnya suasana tertib tidak selalu berhasil membawa dampak kemajuan yang diinginkan. Selain itu penggalian dana, sekalipun diniatkan untuk mempercepat kemajuan, misalnya menambah pungutan dana dari masyarakat, selalu akan mendapatkan perlawanan dari mahasiswa dengan berbagai macam alasannya. Para mahasiswa ini biasanya menuntut PTAIN maju dan dengan biaya murah. Padahal di mana saja dan kapan saja, tidak pernah ada sesuatu yang berkualitas tanpa diikuti oleh biaya tinggi. Akan tetapi itulah aspirasi masyarakat sekarang ini.

Pimpinan PTAIN, terkait dengan pendanaan, selalu dihadapkan oleh pilihan yang amat rumit. Pada satu sisi mereka dituntut dapat memajukan perguruan tingginya, sedang pada sisi lain selalu dibatasi dalam mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang terkait dengan pencaharian sumber dana. Padahal dengan mengacu pada pola dan bahkan besaran pendanaan yang diterima dari pemerintah selama ini tidak akan mencukupi. Jika dengan dana itu masih berjalan, sesungguhnya hanyalah sampai pada batas-batas minimal yang tidak mungkin diharapkan dapat mengalami kemajuan. Sulit dibayangkan, bagaimana pimpinan PTAIN bisa berhasil memaksimalkan pertumbuhan kualitas para dosennya yang bergaji sekitar satu setengah juta rupiah untuk golongan III/b dan sekitar tiga juta rupiah untuk para guru besarnya. Bagaimana dengan penghasilan itu mereka mampu membeli buku, jurnal, majalah dan

bahkan berlangganan Koran, membuka internet ? Jelas kecil sekali kemungkinannya. Maka, sesungguhnya pimpinan PTAIN saat ini masih dihadapkan oleh kenyataan-kenyataan yang berada pada tingkat dasar, yaitu memenuhi kebutuhan hidup para dosennya sehari-hari.

Pengalaman UIN Malang selama ini, sebelum diberlakukan DIPA, terkait dengan penggalan dana, menempuh cara-cara misalnya memberlakukan pungutan tambahan seperti dana pengembangan kampus, DPOP (Dana Penunjang Operasional Pendidikan), sewa tinggal di ma'had, bantuan dari lembaga swasta, baik dalam maupun luar negeri, dan usaha lain yang bisa dilakukan. Oleh karena sumber dana seperti ini dikelola secara mandiri oleh internal kampus, dalam arti tidak harus dipertanggung jawabkan pada negara maka ada keleluasaan sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan yang mendesak dan bersifat strategis Dana yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut, selama ini, dapat digunakan untuk membiayai pengiriman dosen studi lanjut, (sejak 4 tahun lalu UIN Malang mengirimkan setiap tahun 40 dosen studi S3) memberi beasiswa mahasiswa berprestasi, menambah jumlah mobil dinas, memberi modal mengembangkan usaha bisnis serta menambah kesejahteraan dosen maupun pegawai. Sumber pendanaan seperti ini dengan diberlakukannya DIPA dan aturan lain bahwa lembaga pendidikan tidak diperkenankan memungut dana dari masyarakat, maka tidak akan bisa dilakukan lagi, atau kalaupun tetap dilakukan akan beresiko tinggi.

Beberapa tahun lalu, melihat kebutuhan semakin mendesak dan jumlah biaya semakin besar untuk pengembangan kampus ke depan, UIN Malang pernah mencoba menghitung unit cost mahasiswa secara menyeluruh -----menyangkut seluruh aspek, antara lain meliputi pendanaan untuk pengembangan SDM, proses belajar mengajar, laboratorium, perpustakaan, penelitian dan lain-lain. Dari perhitungan itu ditemukan bahwa biaya pendidikan setiap mahasiswa program S1 untuk 8 semester sekitar Rp. 27.500.000,- dengan catatan jumlah mahasiswa minimal 6000 orang. Jika hitungan ini dapat dijalankan maka UIN Malang dapat menggaji dosen golongan III sesuai dengan standart kehidupan dosen di Malang sebesar 4.5 juta dan untuk golongan IV sebesar 7.5 juta. Jika dosen berpenghasilan sebesar itu, maka pantaslah mereka dituntut untuk mengembangkan diri seperti menyewa internet, membeli jurnal, majalah, koran, buku dan kebutuhan lain semisal membangun rumah yang pantas dihuni sebagai seorang dosen. Akan tetapi jika keadaannya seperti sekarang, maka pimpinan tidak bisa terlalu menyalahkan jika mereka kemudian melakukan kegiatan tambahan seperti mengajar di mana-mana, atau bekerja sambil apa saja yang bisa menutupi kebutuhan hidup yang akibatnya cukup parah, yakni kualitas pendidikan tidak akan berhasil ditingkatkan. .

Konsep manajemen pendanaan UIN Malang yang telah disusun dengan susah payah rasanya sulit dilaksanakan, apalagi dengan munculnya aturan baru dari pemerintah tentang pengelolaan keuangan dengan apa yang disebut DIPA seperti yang harus di laksanakan sekarang ini. Keputusan Presiden yang mengatur tentang besarnya biaya pendidikan (SPP) dan laboratorium, UIN Malang baru bisa memilih alternatif ke tiga yaitu Rp. 600.000,- ditambah biaya laboratorium Rp. 200.000,- untuk bidang studi Ilmu-Ilmu Sosial dan Rp. 300.000,- untuk bidang studi ilmu-ilmu alam pada setiap semester. Besarnya SPP dan dana laboratorium tersebut masih sangat kecil bilamana dibandingkan dengan hasil hitungan unit cost yang telah disusun sendiri oleh UIN Malang. Namun demikian, ternyata alternatif ---SPP dan biaya laboratorium setiap semester yang besarnya sekedar Rp. 800.000,- (untuk ilmu-ilmu Sosial) dan Rp.

900.000,- untuk ilmu-ilmu alam tersebut ternyata masih dirasa berat oleh sebagian mahasiswa. Akan tetapi, karena tidak mungkin lagi UIN Malang memilih alternatif terendah sehubungan dengan kebutuhan yang semakin besar, maka sekalipun dirasa berat oleh sebagian mahasiswa, keputusan tersebut tetap dijalankan.

Ke depan, jika kekuatan pemerintah dalam mendanai PTAIN tidak mungkin ditingkatkan, maka harus ada paradigma baru yang memungkinkan masing-masing PTAIN memiliki keleluasaan dalam mengembangkan diri secara variatif, disesuaikan dengan kekuatan masyarakat pendukungnya. Bagi PTAIN yang diposisikan sebagai perguruan tinggi yang telah mampu mengembangkan kualitas secara maksimal, maka perlu diberikan keleluasaan untuk mencari alternatif sumber-sumber pendanaan, dengan catatan mereka harus mampu menjaga efisiensi, transparansi maupun akuntabilitasnya. Terhadap PTAIN semacam ini yang diperlukan oleh pemerintah adalah pertanggung-jawaban pimpinannya bahwa apa saja yang dilakukan adalah benar-benar sebagai upaya untuk mengembangkan kualitas perguruan tingginya. Selanjutnya apa yang telah dirintis oleh beberapa UIN ----Yogyakarta, Jakarta dan Malang dengan status BLU kiranya perlu didorong agar konsep tersebut benar-benar berjalan dengan baik. Saya yakin beberapa PTAIN di Indonesia dengan menawarkan program studi pilihan dan unggul akan mampu mengembangkan pendanaan secara mandiri. Akan tetapi bagi PTAIN tertentu, yang masyarakat pendukungnya belum kuat dan masih sebatas membuka program studi sebagaimana yang lazim dikembangkan selama ini, maka ---mau tidak mau--- harus bersabar mengikuti saja ketentuan yang ada. Sekalipun begitu, mungkin secara pelan dan berjangka panjang, harus didorong untuk mengembangkan diri secara lebih luas untuk mengikuti perkembangan pemahaman masyarakat tentang Islam yang semakin luas dan mendalam.

Satu hal yang perlu disadari bahwa dalam pengembangan lembaga pendidikan, tanpa terkecuali lembaga pendidikan Islam, maka pertumbuhannya selalu seiring dengan perkembangan masyarakatnya. Bangsa Indonesia yang menempati wilayah sedemikian luas dari Sabang sampai Merauke, dari yang berada di ibu kota negara Jakarta sampai yang berada di kota-kota kecil kabupaten/kota di mana PTAIN berada, tidak akan mungkin diharapkan tumbuh secara sama. PTAIN yang berada di kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Malang, Medan, Pekanbaru, Surabaya, Makassar atau kota lainnya setingkat itu tidak akan bisa dikejar oleh mereka yang berada di kota kecil. Di antara beberapa PTAIN sudah diminati oleh masyarakat kelas menengah ke atas, tetapi sebaliknya ada beberapa lainnya yang mungkin baru sebatas diminati oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk mengembangkan lembaga pendidikan Islam yang bermacam ragam kekuatannya itu diperlukan multi policies pendidikan. Dengan kebijakan itu maka semua lapisan masyarakat dapat terlayani secara merata dan proporsional. Lagi pula dengan kebijakan itu akan terhindar pencitraan yang kurang bagus, misalnya bahwa PTAIN hanya mendominasi pada kelas sosial tertentu. PTAIN menurut pandangan saya harus mampu melayani berbagai strata sosial masyarakat yang berbeda-beda itu.

Banyak orang berpandangan bahwa ketersediaan dana merupakan kunci dari segala kemajuan lembaga pendidikan Islam. Saya agak berbeda melihatnya. Berdasarkan sekian lama mengamati dan terlibat mengurus lembaga pendidikan tinggi Islam, berkesimpulan bahwa ketersediaan dana yang cukup jika tidak diikuti oleh kemampuan managerial, bisa saja tidak akan menghasilkan kemajuan apa-apa, dan

bahkan justru melahirkan fitnah yang dapat meruntuhkan sendi-sendi kehidupan lembaga pendidikan itu sendiri. Sebaliknya, dana menurut hemat saya berada pada posisi kemudian setelah idea-idea konkrit dapat dilahir-tumbuh-kembangkan. Apalagi, jika lembaga pendidikan tinggi Islam tersebut mendapatkan suasana yang memungkinkan pertumbuhan dan berkembangnya kreativitas serta dipersubur oleh tumbuhnya jiwa intreprenurship di lembaga pendidikan tinggi itu, maka pendanaan akan tumbuh secara cepat. Karenanya saya berpandangan bahwa sebenarnya modal yang harus ada terlebih dahulu di setiap PTAIN adalah adanya orang yang menyandang banyak idea, memiliki kemampuan membangun jaringan relasi yang luas, dan managerial yang tinggi. Dan, kampus Islam itu menjadi maju bukan sebatas karena tersedianya dana yang selalu dibayangkan itu. Hanya sayangnya di banyak PTAIN, oleh karena yang berkembang baru nuansa idiologis primordial dan bukan nuansa ilmu serta profesionalisme, maka yang terjadi adalah di beberapa tempat lahir banyak masalah, sehingga perguruan tinggi Islam seolah-olah identik dengan lembaga pendidikan yang selalu kaya masalah dan bukannya kaya ide, pikiran-pikiran cerdas dan besar sebagaimana yang diharapkan oleh ummat, Allohu a'lam